

Ketua DPRD Bombana Siapkan Rumah Singgah untuk Siswa Pulau Sagori

Bombana, Sultranet.com — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan dengan membuka rumah singgah untuk siswa asal Pulau Sagori, Kecamatan Kabaena, Sulawesi Tenggara. Inisiatif ini diumumkan dalam kegiatan reses yang digelar Kamis, 29 Mei 2025, di lokasi rumah singgah yang telah disiapkan di Kampung Bajau, Kelurahan Sikeli, Kabaena Barat.

Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan warga Sagori yang selama ini menghadapi kendala besar saat anak-anak mereka hendak menempuh pendidikan di daratan Kabaena. Setiap musim barat datang, gelombang laut tinggi kerap menghalangi perjalanan para siswa sehingga mereka terpaksa absen dari sekolah.

“Setiap musim barat datang, laut bergelombang tinggi dan anak-anak kami tidak bisa ke sekolah. Ini sudah lama terjadi,” kata seorang ibu rumah tangga dari Pulau Sagori saat menyampaikan aspirasi dalam dialog bersama Ketua DPRD.

Menanggapi kondisi tersebut, Iskandar menyatakan bahwa dirinya tidak ingin sekadar menjadi pendengar. Ia menyampaikan secara langsung bahwa rumah singgah telah disiapkan lengkap dengan fasilitas dasar, sebagai solusi jangka panjang bagi anak-anak Pulau Sagori agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir akan kondisi cuaca ekstrem.

“Saya mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan saya tidak ingin hanya berhenti di mendengar. Hari ini saya nyatakan bahwa rumah singgah ini siap digunakan oleh anak-anak kita dari Pulau Sagori,” ujar Iskandar.

Rumah singgah ini terletak di lokasi strategis, hanya beberapa ratus meter dari fasilitas pendidikan di Sikeli. Lingkungan sekitar juga dikenal aman dan memiliki iklim sosial yang mendukung aktivitas belajar siswa. Rumah singgah ini diprioritaskan untuk digunakan para pelajar tingkat SMP dan SMA yang selama ini terkendala akses transportasi laut.

Selain menjadi simbol kepedulian terhadap dunia pendidikan, rumah singgah ini juga dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan dialog reses. Dalam suasana penuh keakraban, para warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga orang tua siswa menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang diambil oleh Ketua DPRD tersebut.

“Kita tidak boleh membiarkan jarak, cuaca, dan geografis menjadi penghalang bagi masa depan anak-anak kita. Pendidikan adalah investasi jangka panjang,” tambah Iskandar di hadapan para peserta dialog.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan untuk bersama-sama memperkuat akses dan fasilitas pendidikan, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terluar yang rentan terhadap hambatan geografis.

Menurut Iskandar, kehadiran rumah singgah ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara yang berdampak besar dalam jangka panjang, sembari mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Bombana.

“Ini bukan soal gedung, tapi soal peluang. Selama ini banyak anak-anak kita di kepulauan harus memilih antara keselamatan dan sekolah. Saya tidak ingin mereka terus menghadapi pilihan seperti itu,” pungkasnya.

Rumah singgah ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat tidur, perlengkapan mandi, dan area belajar bersama. Iskandar menyatakan akan terus memantau kebutuhan tambahan ke depannya dan membuka ruang bagi masyarakat yang ingin turut berkontribusi.

Langkah humanis dari Ketua DPRD Bombana ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di wilayah pesisir, khususnya bagi masyarakat Pulau Sagori yang telah lama menginginkan perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak mereka.

Bombana Dorong Pemanfaatan Sampah Jadi Sumber Ekonomi Melalui Sosialisasi TPS 3R

Bombana, Sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) Kelurahan Poea, Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang bertujuan mempercepat gerakan peduli lingkungan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber daya.

Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, yang dalam kesempatan itu tidak hanya memberikan sambutan, tetapi juga ikut langsung mempraktikkan proses pengolahan sampah di TPS 3R. Fatmawati menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

“Pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa sampah bisa menjadi berkah bila dikelola dengan benar,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, Sitti Arnidar, S.Hut., MM, menambahkan bahwa sosialisasi ini adalah langkah awal dari rangkaian gerakan lingkungan berkelanjutan yang akan dijalankan secara bertahap di seluruh wilayah Bombana. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dan peran strategis PKK dalam menggerakkan masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, untuk aktif dalam pengelolaan sampah sejak tingkat rumah tangga.

“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui peran aktif PKK, akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ibu rumah tangga berperan penting dalam memilah dan mengolah sampah di rumah masing-masing,” jelas Sitti.

Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan praktik langsung pembuatan kompos dari sampah organik, pemanfaatan kembali sampah plastik, serta pengenalan sistem bank sampah yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat melihat sampah bukan sebagai beban, melainkan peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

TPS 3R Kelurahan Poea sendiri menjadi model pengelolaan sampah berbasis sumber daya yang inovatif. Dengan memanfaatkan prinsip reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), dan recycle (mendaur ulang), tempat pengolahan ini mampu mengubah sampah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomis dan ramah lingkungan.

Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus mendukung program pembangunan berkelanjutan. Melalui sosialisasi dan praktek langsung ini, masyarakat diharapkan makin sadar dan tergerak untuk aktif berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ketua Tim Penggerak PKK, Fatmawati, secara khusus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik. “Mari kita ubah pola pikir tentang sampah. Jika dikelola dengan benar, sampah justru bisa menjadi berkah yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga lingkungan kita tetap lestari,” tuturnya.

Dengan langkah konkret seperti ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat membangun kesadaran kolektif yang kuat, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi menjadi persoalan, tetapi menjadi solusi untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di masa depan.

Sultra Siap Gaungkan Kejayaan

Pramuka, Pemprov Alokasikan Anggaran Besar untuk Pembinaan

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kejayaan Gerakan Pramuka di daerah. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Sultra, melalui Wakil Gubernur Ir. Hugua, M.Ling, menyampaikan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pilar penting dalam membentuk karakter dan keterampilan generasi muda.

“Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran yang jauh lebih besar di tahun 2025 untuk mendukung program pembinaan pramuka. Ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa membina generasi bangsa bisa ditempuh melalui jalur kepramukaan,” kata Wakil Gubernur saat menyampaikan sambutan Gubernur dalam pelantikan Mabida dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sultra periode 2024-2029 di Kendari, Sabtu, 3 Mei 2025.

Acara pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso dan Sekretaris Jenderal Kwarnas Mayjen TNI (Purn) DR. Bachtiar, S.I.P., M.A.P. Turut hadir pula para bupati dan wali kota se-Sultra sebagai Ketua Mabidab, serta jajaran Forkopimda Sultra.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan salam hangat Gubernur kepada Ketua Kwarnas, seraya mengingatkan kembali bahwa pemilihan Kak Budi Waseso sebagai Ketua Kwarnas dilakukan di Kendari dalam Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018.

“Saya meyakini Kakak Budi Waseso akan selalu mengingat Kendari sebagai kota penuh kesan. Di sinilah beliau dipercaya memimpin gerakan pramuka secara nasional,” ujar Hugua.

Gerakan Pramuka, kata dia, menjadi harapan pemerintah di tengah tantangan globalisasi dan potensi disintegrasi bangsa. Ia menegaskan, pendidikan kepramukaan bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2010.

Namun demikian, Wagub menyoroti masih rendahnya kepedulian sejumlah kepala daerah terhadap pentingnya gerakan pramuka. Karena itu, Pemprov Sultra menargetkan kebangkitan gerakan pramuka sebagai salah satu prioritas kepemimpinan saat ini.

“Saya meminta bupati dan wali kota memberi perhatian serius terhadap kwartir cabang di daerah masing-masing, termasuk mendukung gugus depan di satuan pendidikan, karena di situlah anak-anak kita langsung dibina dan dididik,” ujarnya menegaskan.

Gubernur juga meminta agar OPD dan instansi vertikal berperan aktif membina satuan karya pramuka di lingkungan masing-masing. Tak hanya dukungan anggaran, peningkatan kapasitas SDM pembina dan pelatih juga menjadi fokus.

“Saya berharap para pelatih dan pengurus pramuka memiliki profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena di tangan kakak-kakaklah akan lahir generasi pramuka yang unggul,” ujar Wagub.

Lebih jauh, Pemprov Sultra juga menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah kegiatan nasional kepramukaan. “Saya meminta Kakak Ketua Kwarda Asrun Lio untuk berkoordinasi lebih teknis dengan Kwarnas guna mempersiapkan kegiatan nasional yang bisa digelar di Sultra. Insyaallah gubernur akan beri dukungan maksimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Sultra Kakak Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sultra atas dukungan nyata terhadap kegiatan pramuka. Ia mengatakan, dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang pramuka sebagai jalan strategis membina generasi bangsa.

“Gerakan kepanduan telah eksis sejak 1912. Filosofi pramuka digali dari budaya Indonesia. Bung Karno bahkan menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka melalui Keppres Nomor 238 Tahun 1961,” kata Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan sejarah panjang pramuka, termasuk perannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga menjadi rumah besar pembinaan karakter

generasi muda Indonesia.

“Gerakan pramuka mampu menyatukan bangsa ini di tengah banyaknya perbedaan kepentingan. Ini potensi besar. Jaringan kita kuat, struktur organisasi kita sistematis, dan anggota tersebar hingga ke pelosok,” ujarnya.

Kwarda Sultra, kata dia, siap melaksanakan program pembinaan yang selaras dengan agenda nasional dan daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kwarnas atas perhatian dan bimbingan yang telah diberikan.

“Untuk kakak-kakak pengurus Kwarda yang baru dilantik, mari kita jalankan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi. Mari bangkitkan kembali pendidikan kepanduan di Bumi Anoa,” tutup Asrun Lio.

Pelantikan Mabida dan Kwarda Sultra ini turut disempurnakan dengan agenda rapat kerja daerah (Rakerda) yang akan digelar pada 4 Mei 2025, untuk menyusun program kerja tahun 2025 dan 2026. Sebelumnya, telah digelar rapat teknis pembinaan anggota dewasa serta sidang paripurna penegak dan pandega.

123 Jemaah Haji Bombana Dilepas, Bupati Burhanuddin: Jaga Niat dan Kekompakan

Bombana, Sultranet.com - Sebanyak 123 jemaah haji asal Kabupaten Bombana secara resmi dilepas keberangkatannya oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara penuh haru yang digelar di pelataran Masjid Agung Nurul Iman, Kasipute, Selasa pagi, 27 Mei 2025.

Dalam momen pelepasan yang dihadiri ratusan keluarga dan kerabat, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa syukur karena tahun ini kembali ada warga Bombana yang mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji. Ia mengingatkan bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan lahir

dan batin.

“Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Jaga niat, jaga kekhusyukan, dan jangan lupa mendoakan daerah kita tercinta Bombana agar selalu dalam lindungan Allah SWT,” ujar Burhanuddin saat memberikan sambutan di hadapan para jemaah dan keluarga yang memadati halaman masjid.

Keberangkatan jemaah haji Bombana tahun ini tergabung dalam kloter 38 bersama jemaah dari Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, dan Kota Baubau. Data dari Kementerian Agama Kabupaten Bombana menyebutkan, total jemaah yang diberangkatkan mencapai 123 orang, terdiri dari 75 jemaah perempuan dan 48 jemaah laki-laki.

Pelepasan yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar para jemaah diberi kelancaran dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah di tanah suci.

“Semoga semua jemaah diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan selama menjalankan ibadah. Kami semua mendoakan agar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, sebagai haji yang mabrur,” ucap Fatmawati dengan penuh haru.

Prosesi seremonial turut dirangkaikan dengan pembacaan doa bersama, pemberian bingkisan simbolis serta perlengkapan haji oleh Pemerintah Kabupaten Bombana kepada perwakilan jemaah. Wajah haru tampak menyelimuti para keluarga yang mengantar, sebagian tak kuasa menahan air mata saat melepas orang terkasih menuju tanah suci.

Selain doa-doa yang mengiringi, suasana semakin hangat dengan pelukan, tangis dan lambaian tangan perpisahan dari keluarga. Banyak yang berharap jemaah tak hanya pulang dalam keadaan sehat, namun juga membawa perubahan positif setelah menunaikan rukun Islam kelima.

Bupati Bombana juga berpesan agar para jemaah tetap menjaga kekompakan selama berada di tanah suci, serta mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sepanjang rangkaian ibadah berlangsung.

“Saling membantu dan menjaga satu sama lain itu penting. Kita ini satu keluarga besar, berangkat bersama, pulang pun harus bersama. Jangan lupa, ibadah ini adalah amanah, mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya,” tegas Burhanuddin.

Di akhir sambutannya, ia juga meminta agar seluruh jemaah mendoakan Bombana agar senantiasa dilimpahi berkah dan dijauhkan dari segala bencana.

Suasana haru, hangat dan penuh doa menjadi penanda kuat bahwa momen keberangkatan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan juga refleksi atas kerinduan mendalam masyarakat Bombana untuk bertamu ke Baitullah. Harapan besar pun mengiringi langkah para jemaah — menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak, dan membawa keberkahan sepulang dari tanah suci.

1.145 Jemaah Haji Sultra Diberangkatkan Bertahap dari Bandara Haluoleo

Konsel, Sultranet.com — Sebanyak 1.145 jemaah haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara diberangkatkan secara bertahap ke Tanah Suci sejak 22 Mei 2025. Pemberangkatan melalui Bandara Haluoleo Kendari akan berakhir pada 28 Mei 2025, sebagai penutup rangkaian keberangkatan tahun ini.

Pemberangkatan dilakukan menggunakan dua maskapai, yakni Lion Air dan Garuda Indonesia, berdasarkan jadwal yang telah disusun sesuai kabupaten/kota asal jemaah. Total ada sembilan daerah pengirim jemaah: Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Bombana, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur.

Kota Kendari tercatat sebagai daerah dengan jumlah jemaah terbanyak, yakni 561 orang. Mereka diberangkatkan dalam empat gelombang menggunakan maskapai Lion Air pada 22 dan 25 Mei 2025. Di hari-hari berikutnya, kabupaten/kota lain menyusul sesuai slot dan ketersediaan penerbangan.

Kabupaten Bombana sendiri terbagi dalam dua kloter: Kloter 35 dan Kloter 38. Ketua Kloter asal Bombana, Surahman, mengonfirmasi bahwa “Alhamdulillah, Kloter 35 diberangkatkan dari Bandara Haluoleo pada Sabtu, 24 Mei 2025, sebanyak 4 orang. Hari ini, Selasa (27/5), Kloter 38 yang membawa 123 jamaah dan 1 petugas kembali diberangkatkan dari Bandara Haluoleo.”

Adapun Kabupaten Konawe memberangkatkan 146 jamaah pada 24 Mei melalui penerbangan tambahan (extra flight) maskapai Garuda Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Konawe Utara mengirimkan 37 jamaah, Wakatobi 85 jamaah, dan Buton Utara 7 jamaah, yang semuanya telah diberangkatkan sesuai jadwal.

Pemberangkatan akan ditutup besok, Rabu 28 Mei 2025, dengan keberangkatan jamaah dari tiga kabupaten terakhir: Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 19 jamaah, Konawe Selatan sebanyak 73 jamaah, dan Kolaka Timur sebanyak 90 jamaah. Ketiganya dijadwalkan terbang menggunakan Lion Air pada pukul 14.30 WITA.

Untuk mendukung kelancaran proses, fasilitas pelayanan disiapkan oleh pemerintah, termasuk 58 unit kursi roda bagi jamaah lansia serta 16 unit bus pengantar dari masing-masing kabupaten/kota ke Bandara Haluoleo. Sebagian jamaah lainnya tiba menggunakan kendaraan pribadi yang difasilitasi oleh keluarga dan kerabat.

Keberangkatan jamaah haji tahun ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Sultra setelah beberapa tahun terakhir menghadapi pembatasan kuota akibat pandemi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui dinas terkait dan Kementerian Agama berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, mulai dari persiapan di daerah hingga keberangkatan ke Arab Saudi.

“Kami bekerja sama dengan seluruh pihak, baik dari Pemprov, kabupaten/kota, maskapai penerbangan, hingga Kementerian Agama untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar dan jamaah dapat beribadah dengan khushyuk,” kata salah satu pejabat Haji Daerah, yang turut memantau jalannya proses pemberangkatan di Bandara Haluoleo.

Para jamaah terlihat antusias dan haru saat hendak memasuki ruang tunggu bandara. Suasana penuh doa dan harapan menyelimuti setiap keberangkatan. Keluarga yang mengantar pun tampak tulus melepas orang tercinta dengan pelukan dan linangan air mata.

Pemberangkatan kali ini juga menjadi simbol pulihnya semangat ibadah haji di Sulawesi Tenggara. Setelah jeda panjang akibat pandemi, masyarakat kembali diberikan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam kelima dengan perasaan syukur dan harapan besar untuk meraih haji yang mabrur.

“Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kekuatan selama menjalankan ibadah haji. Dan semoga kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur,” tutur seorang petugas haji saat memberangkatkan kloter terakhir hari ini.

Dengan semangat kebersamaan dan kerja sama lintas lembaga, proses pemberangkatan tahun ini menjadi bukti kesiapan dan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Doa dan dukungan dari masyarakat Sultra turut mengiringi perjalanan suci para tamu Allah ini.

Gubernur Sultra Lantik 13 Pejabat Eselon II, Tegaskan Jabatan Adalah Amanah

Kendari, Sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra). Proses pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (26/5/2025), dan merupakan bagian dari rotasi serta penyegaran birokrasi demi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 10073.3.1/142 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 Mei 2025 di Kendari. Selain 13 pejabat yang dilantik, satu pejabat lainnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya, dan sejumlah pejabat ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada beberapa perangkat daerah yang mengalami kekosongan jabatan.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan bahwa rotasi jabatan bukanlah hal luar biasa dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dipandang sebagai hadiah, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan itu bukan hak apalagi untuk disombongkan. Ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab besar. Saya berharap semuanya bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk kepentingan rakyat,” ujar Gubernur saat memberikan arahan kepada pejabat yang dilantik.

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tiga bulan. “Saya tidak melihat siapa Anda atau dari mana asalnya. Saya hanya melihat kerja nyata dan integritas. Jika tidak mampu menjalankan tugas, maka akan diganti,” katanya tegas.

Para pejabat yang dilantik menduduki posisi strategis di lingkup Pemprov Sultra. Di antaranya Laode Butolo sebagai Sekretaris DPRD Sultra, Dr. Sukanto Toding sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, La Haruna sebagai Asisten Administrasi Umum, dan La Ode Rusdin Jaya sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura.

Beberapa jabatan lainnya yang mengalami perubahan termasuk Kepala BKD, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kepala BPBD Sultra. Di sisi lain, Drs. La Ode Saifuddin ditunjuk sebagai Kepala BPBD menggantikan Muhammad Yusuf yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Selain pelantikan definitif, Gubernur juga menyerahkan surat perintah tugas kepada sejumlah pejabat yang ditunjuk sebagai Plt kepala perangkat daerah. Tercatat ada 13 pejabat Plt yang diberi kepercayaan untuk mengisi kekosongan sementara, seperti Prof. Dr. Andi Khaeruni R sebagai Plt Kepala BKD, Prof. Dr. Muhammad Taufik sebagai Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Prof. Dr. Aris Badara sebagai Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa kepala perangkat daerah juga melakukan penugasan internal dengan menunjuk pejabat sebagai Plt, antara lain dr. Asridah sebagai Plt Kadis Kesehatan, dr. Muchammad Saiful sebagai Plt Direktur RSUD Bahteramas, serta Andi Syahrir sebagai Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan.

Dalam pidatonya, Gubernur mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak berkecil hati jika mengalami rotasi atau penugasan sementara. Menurutnya, kesempatan untuk mengabdikan tetap terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan integritas.

“Bagi yang digeser, jadikan ini sebagai bahan introspeksi. Jangan putus asa, saya tetap membuka peluang bagi siapa pun yang mampu dan layak. Mari kita bekerja dengan hati, saling mendukung demi Sulawesi Tenggara yang lebih maju, sejahtera dan religius,” ujar Gubernur dengan penuh harap.

Acara pelantikan dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para pejabat tinggi pratama lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari agenda strategis pemerintahan untuk mempercepat realisasi program pembangunan serta memastikan keberlanjutan pelayanan publik di daerah.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Rakor ini digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemprov Sultra mengikuti kegiatan ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra, Senin, 26 Mei 2025.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator

keberhasilan kerja kepala daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga dengan baik.

“Angka pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian dari seluruh kepala daerah, karena kerja kepala daerah itu yang paling utama dari angka pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito dalam arahannya.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang positif akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kenaikan pertumbuhan ekonomi sekecil apa pun akan memberikan manfaat besar jika disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhannya minus, daerah itu mundur. Yang miskin makin miskin, nanti jangan berpikirlah untuk menangani kemiskinan ekstrem kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat, kata dia, menargetkan angka pertumbuhan nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio, Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam paparannya menekankan bahwa menjaga inflasi tetap rendah merupakan pilar penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. “Menjaga inflasi adalah pilar penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan, juga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” kata Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga 23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen. Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal ini, menurutnya, sangat penting terlebih menjelang momentum hari besar keagamaan seperti Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan instansi vertikal dan pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan suplai dan permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami fluktuasi harga.

Melalui keikutsertaan dalam rakor nasional ini, Pemprov Sultra menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam upaya nasional menekan inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Koperasi Merah Putih Jadi Kendaraan Ekonomi Desa

Kendari, Sultranet.com - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan “Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih” yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Minggu, 25 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Yandri Susanto, Wakil Gubernur Sultra, Sekda Provinsi, para bupati dan walikota, termasuk Bupati Bombana H. Burhanuddin, serta para kepala desa, lurah, anggota BPD, tenaga pendamping desa, penyuluh, notaris, hingga perangkat dinas terkait.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi menyampaikan bahwa koperasi Merah Putih menjadi alat penting untuk mempercepat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, jika koperasi dapat berdiri secara merata dan kuat di setiap desa, maka urbanisasi akibat kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

“Koperasi Merah Putih adalah alat strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kalau koperasi kuat, tidak ada lagi alasan bagi warga desa untuk pergi mencari penghidupan di kota,” ujar Gubernur Andi.

Ia bahkan memberikan motivasi kepada para kepala desa dengan janji hadiah satu unit sepeda motor untuk setiap desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum Juli 2025.

“Kalau koperasi desa berhasil kita bentuk di 2.285 desa hingga Juli 2025, maka setiap desa akan mendapatkan hadiah 1 unit motor. Ini bukan dari APBD, tetapi dari kekuatan saya pribadi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto menegaskan bahwa program ini bukan semata kebijakan teknis kementerian, melainkan arahan langsung dari Presiden RI sebagai bentuk nyata dari upaya pengentasan kemiskinan di desa.

“Presiden ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat desa yang miskin. Karena itu, koperasi ini bukan hanya program ekonomi, tapi juga program pengentasan kemiskinan,” jelas Menteri Yandri.

Ia menyebutkan bahwa program Koperasi Merah Putih telah dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga.

Yandri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa agar program ini benar-benar menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa.

“Saya mengapresiasi kesiapan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan agenda percepatan pembentukan koperasi. Saya yakin, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi desa,” ujarnya.

Menurut dia, visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 harus dimulai dari penguatan desa.

“Harapan Presiden Prabowo, Indonesia tahun 2045 harus menjadi negara maju dan rakyatnya sejahtera. Maka desa harus kuat, dan Koperasi Merah Putih adalah kendaraan strategis menuju ke sana,” kata Yandri.

Bupati Bombana H. Burhanuddin yang hadir dalam kegiatan itu menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi di wilayahnya. Ia menilai, koperasi tidak hanya sebagai wadah ekonomi, tetapi juga ruang kolaborasi yang memperkuat solidaritas dan partisipasi warga desa.

“Kami di Bombana siap bersinergi. Ini bukan sekadar agenda program, tapi amanat moral untuk mengangkat harkat hidup masyarakat desa,” ungkap Burhanuddin usai kegiatan.

Acara ini juga menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan langkah antar pemangku kepentingan, termasuk notaris yang akan memfasilitasi legalitas koperasi, serta perangkat daerah yang berperan langsung dalam

pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong agar seluruh desa dan kelurahan di wilayahnya segera melaksanakan musyawarah khusus pembentukan koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari gerakan nasional yang dicanangkan Presiden RI.

Pemprov Sultra Klarifikasi Proses Seleksi Direksi Perumda

Kendari, Sultranet.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) angkat bicara terkait tuduhan miring yang beredar di masyarakat mengenai proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra. Melalui Kepala Biro Ekonomi Setda Pemprov Sultra, Abdul Rajab, ST, M.Si, pihaknya menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Proses seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Sultra telah dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Direksi BUMD,” ujar Abdul Rajab kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).

Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sultra menyambut baik berbagai tanggapan publik yang mencerminkan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, perhatian publik merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas, namun perlu diluruskan apabila terdapat penafsiran keliru terhadap regulasi yang menjadi dasar hukum seleksi.

“Kami memberikan apresiasi terhadap masukan masyarakat, namun penting juga untuk memberikan penjelasan agar tidak terjadi salah tafsir terhadap aturan. Permendagri tersebut harus dibaca secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” kata Rajab.

Ia menjelaskan, seluruh proses seleksi yang dilakukan Pemprov Sultra mengikuti kaidah hukum yang ditetapkan dalam Permendagri 37 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, terdapat pasal-pasal yang saling terkait, termasuk dalam hal pembentukan panitia seleksi dan pelibatan tim atau lembaga profesional dalam uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

Rajab merinci bahwa pada Pasal 7 Ayat 3 terdapat tujuh poin tugas panitia seleksi, salah satunya membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional yang akan melaksanakan UKK. Sementara pada Pasal 11 Ayat 2 dijelaskan bahwa UKK harus dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional.

“Selanjutnya, Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksanaan UKK oleh tim tersebut dapat melibatkan konsultan perorangan, dan pada Ayat 3 ditegaskan bahwa tim atau lembaga profesional tersebut harus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah,” jelasnya.

Menurutnya, jika penetapan tim UKK tidak dilakukan melalui keputusan kepala daerah, justru akan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Karena itu, penetapan tersebut merupakan langkah konstitusional dan wajib sebagai bagian dari tata kelola yang akuntabel.

Rajab juga menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi telah ditempuh sesuai mekanisme yang tertuang dalam regulasi. Oleh karena itu, Pemprov Sultra meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap mempercayai proses yang telah berjalan.

“Kami berharap dengan penjelasan ini, opini-opini miring yang berkembang bisa ditepis. Pemprov Sultra telah menjalankan semua proses sesuai aturan yang ada. Tidak ada yang kami langgar, dan kami terbuka terhadap pengawasan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses-proses pemerintahan secara proporsional dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak berdasar. Menurutnya, transparansi dan partisipasi publik menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.

Abdul Rajab menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemprov Sultra berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta menjamin bahwa setiap proses pengangkatan pejabat di lingkungan BUMD dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

“Jika masyarakat ingin tahu lebih jauh, kami siap membuka ruang diskusi. Pemerintah tidak antikritik, tetapi mari kita bicara berdasarkan data dan regulasi,” pungkasnya.

Koperasi Merah Putih Dicanangkan di Sultra, Gubernur dan Menteri Desa Kompak Dukung Ekonomi Desa

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi mencanangkan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi desa. Acara peluncuran berlangsung di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5/2025), dihadiri Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Menteri Desa PDTT H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.

Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya agenda besar pembangunan desa berbasis potensi lokal, sekaligus menegaskan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di seluruh desa dan kelurahan di Bumi Anoa.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan dukungannya terhadap program nasional tersebut yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. “Koperasi Merah Putih ini menyentuh langsung ekonomi rakyat. Ini bukan hanya program, tapi solusi konkret memperkuat pertanian, UMKM, dan ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hingga 24 Mei pukul 18.00 WITA, musyawarah desa dan kelurahan telah dilakukan di 1.557 dari total 2.285 desa dan kelurahan, atau sekitar 68,1 persen. Sebanyak 58 koperasi telah memiliki akta notaris, sementara

113 lainnya masih dalam proses. Targetnya, seluruh musyawarah akan rampung paling lambat 31 Mei 2025.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menjanjikan hadiah satu unit motor bagi setiap kepala desa yang berhasil membentuk koperasi sebelum tenggat. “Kalau ini berhasil, tidak ada lagi alasan masyarakat hijrah ke kota. Desa akan menjadi tempat yang sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Yandri menekankan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. “Ini bukan hanya inisiatif. Ini gerakan nasional. Gubernur menjadi ketua satgas di provinsi, dan bupati/wali kota memimpin di tingkat kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menyebut koperasi ini akan berfungsi sebagai koperasi kebutuhan pokok, simpan pinjam, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat, tambahnya, telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian koperasi termasuk notaris, regulasi, dan anggaran pendukung tanpa membebani Dana Desa.

“Sudah ada contoh sukses, BUMDes dari Banten bisa ekspor ke Prancis. Artinya, desa punya daya saing global. Koperasi ini akan memperbaiki distribusi pangan nasional dan menstabilkan harga,” ujar Menteri Yandri.

Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa PDTT, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Selain itu hadir pula Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Provinsi, Forkopimda, para kepala daerah kabupaten/kota, camat, lurah, dan kepala desa se-Sultra.

Gubernur Andi juga mengungkapkan arah baru pembangunan desa di Sultra melalui program desa ekspor, desa tematik, dan desa sejahtera. Ia berharap koperasi desa nantinya mampu menjadi penyedia logistik bagi para pekerja di sekitar desa, sekaligus mengangkat potensi lokal ke panggung nasional dan internasional.

“Kami ingin masyarakat desa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Jangan hanya jadi penonton. Pemerintah hadir untuk memastikan desa tumbuh menjadi pusat kesejahteraan,” ujarnya.

Sebagai penutup, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi atas kesiapan Sultra

melaksanakan percepatan pembentukan koperasi. Ia optimistis Koperasi Merah Putih akan menjadi pendorong utama ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045. “Desa yang kuat akan menjadikan Indonesia sejahtera. Koperasi ini kendaraan menuju ke sana,” pungkasnya.

Seluruh kepala daerah dan perangkat desa se-Sultra sepakat mempercepat proses pembentukan koperasi dan menargetkan selesai pada akhir Juni 2025, sejalan dengan Instruksi Presiden yang menjadi pijakan hukum dan arah pembangunan desa secara nasional.